MENYUSUL SURAT EDARAN PEMERINTAH PUSAT

Pemkot Kaji Rencana 'Refocusing' APBD 2021

YOGYA (KR) - Sejumlah pemerintah daerah di DIY mengambil kebijakan refocusing APBD 2021 menyusul adanya surat edaran dari pemerintah pusat. Pemkot Yogya pun tengah mengkaji rencana tersebut.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku siap melakukan refocusing seperti halnya pada tahun lalu. "Kita siap saja. Kemarin secara lisan sudah dibahas dan sekarang dokumennya sedang dikaji," tandasnya, Jumat (26/2).

Pada penyusunan APBD 2021, Pemkot Yogya bersama dewan sudah mempertimbangkan kegiatan penanganan Covid-19, baik aspek pencegahan, penanganan kasus maupun pemulihan ekonomi. Seluruh kegiatan itu pun masuk dalam anggaran atau program reguler yang tersebar di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Begitu pula terhadap kegiatan darurat dan belum teralokasikan, bisa diakomodir melalui biaya tidak terduga yang nilainya mencapai Rp 13 miliar.

Heroe menjelaskan pihaknya tidak hanya melibatkan kalangan dewan dalam hal pembahasan anggaran. Tetapi juga menggandeng pihak kejaksaan sebagai bentuk kehati-hatian. Terutama untuk pencairan dan penggunaan biaya tidak terduga guna penanganan Covid-19. "Konstruksi APBD 2021 sudah cukup fokus dalam penanganan Covid-19. Mitra pemerintah juga terlibat agar kebijakan yang diambil tepat," imbuhnya.

Sementara merujuk Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 terkait penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah, terdapat sejumlah refocusing. Terutama berkaitan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Refocusing tersebut menyangkut penanganan pandemi Covid-19, termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Khusus DAU, minimal dialokasikan delapan persen dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemanfaatan untuk mendukung vaksinasi, posko di kelurahan serta insentif tenaga kesehatan daerah. Sedangkan DID, minimal dialokasikan 30 persen dari yang diterima daerah untuk bidang kesehatan.

Ketentuan lain yang masuk refocusing ialah DAK fisik agar sebanyak mungkin menggunakan tenaga kerja lokal maupun bahan baku lokal. Surat edaran tersebut juga menyinggung perihal dana desa, akan tetapi Kota Yogya tidak termasuk sebagai daerah penerima. **(Dhi)-f**

Komunitas Malioboro Berharap Segera Divaksin

YOGYA (KR) - Pedagang pasar hingga komunitas Malioboro akan menjadi sasaran vaksin tahap kedua. Hanya saja, belum semuanya terdaftar dalam calon penerima vaksin tahap kedua. Seperti yang dirasakan Joko Suparjo, salah satu pengemudi becak motor. Ada 20 pengemudi lagi yang tergabung dalam komunitas, juga belum terdaftar sebagai calon penerima. Dia berharap dapat segera di vaksin, agar lebih tenang saat bekerja.

"Kalau mau jujur, saya sendiri juga masih kurang tahu akan keamanan vaksin Covid-19. Karena ada yang sudah di vaksin, tapi justru positif. Tapi *insya Allah*, saya siap di vaksin," katanya kepada Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang menemuinya, Jumat (26/2).

KR-Atiek Widyastuti H

Wakil Ketua DPRD DIY berbincang dengan pedagang Malioboro tentang vaksin.

Untuk itu dia meminta jaminan dari pemerintah, vaksin benar-benar aman. Agar dia dan mungkin masih ada yang ragu, bisa benar-benar yakin ketika nanti di vaksin.

Sedangkan Eka, pedagang di Malioboro sudah terdaftar sebagai calon penerima vaksin. Sejumlah pedagang kuliner sudah didata dan dia mengaku siap di vaksin. "Harapannya dengan vaksin, Covid-19 segera berlalu dan perekonomian juga cepat pulih," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana usai menemui komunitas Malioboro meminta kepada pemerintah untuk tidak melewatkan satupun warga sebagai penerima vaksin. Pendataan ulang juga bisa dilakukan. Apalagi ada beberapa komunitas Malioboro yang ternyata belum terdaftar sebagai calon penerima vaksin.

"Kita semua mendukung vaksin, karena ini adalah upaya menekan kasus Covid-19. Untuk itu, harus dipastikan semuanya di vaksin. Apalagi Malioboro, pusat ekonomi DIY. Jadi pengunjung juga merasa tenang karena pedagangnya sudah di vaksin," ujarnya. **(Awh)-f**

PENATAAN PEGAWAI 'SERBU' WILAYAH

Seluruh Jabatan Tinggi Terisi

YOGYA (KR) - Empat jabatan tinggi pratama di Kota Yogya yang mengalami kekosongan sejak awal tahun, akhirnya terisi. Proses pengisian membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme lelang secara terbuka.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, menegaskan pihaknya berkomitmen agar tidak ada lagi jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (plt). "Harapan saya semua bisa diisi secara definitif. Tetapi beberapa jabatan memang harus ada mekanismenya sehingga tidak bisa langsung. Seperti jabatan tinggi pratama ini kan perlu lelang," urainya di sela melantik pimpinan jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Yogya, Jumat (26/2).

Total ada 34 pejabat dan pegawai yang turut dilantik. Empat pejabat tinggi pratama hasil seleksi atau lelang secara terbuka yang dilantik ialah Octo Noor Arafat (Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan), Tri Karyadi Riyanto (Kepala Dinas Perindustrian UKM dan Koperasi), Veronica Ambar Ismuwardani (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), dan Budi Santoso (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

Haryadi menyebut, pejabat yang dilantik sudah disesuaikan dengan kapasitasnya. Oleh karena itu mereka diminta segera menyesuaikan diri di lingkungan baru serta bergerak cepat dalam menjalankan roda organisasi. "Tidak butuh waktu lama untuk adaptasi. Harus bisa bekerja sama dan kegiatan berjalan sesuai target," tandasnya.

Diakuinya, hasil penataan masih menyisakan sejumlah jabatan yang kosong. Akan tetapi jabatan yang bersifat teknis dan mengampu masyarakat, dirinya berkomitmen tidak boleh ada yang kosong. Sehingga penataan pegawai pada saat ini akan 'menyerbu' wilayah terutama di jenjang kelurahan dan kemantren.

Menurut Haryadi, wilayah harus diperkuat seiring dengan penanganan pandemi Covid-19. Apalagi saat ini ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dengan fokus pengendalian di tingkat bawah. "Kan jangan sampai kasus Covid-19 ini terus bertambah. Tiga aspek yang jadi fokus kita ialah pencegahan, penanganan dan pemulihan ekonomi," katanya. **(Dhi)-f**

Kodim Kota Yogya Canangkan Zona Integritas

KR-Saifullah Nur Ichwan

Dandim dalam pencanangan zona integritas.

YOGYA (KR) - Kodim 0734/Kota Yogya mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan pencanangan ini diharapkan lebih tertib dan tidak ada KKN.

Dandim 0734/Kota Yogya Kol Arm Tejo Widhuro SSos MSi mengatakan, mulai 2021, Kodim Kota Yogya sudah menjadi satuan kerja (satker) sendiri. Untuk itu, Kodim Kota Yogya sekarang ini mulai mencanangkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

"Dulu kami masih menjadi satu dengan Korem 072/Pamungkas. Namun dengan perubahan tipe B menjadi tipe A, Kodim Kota Yogya sekarang jadi satker tersendiri," kata Tejo saat pencanangan zona integritas di Makodim Kota Yogya, Jumat (26/2).

Dengan pencanangan ini, harapannya lebih tertib dan tidak ada KKN. Sehingga nantinya semua kegiatan yang ada di Kodim Kota Yogya tepat sasaran dan sesuai dengan harapan. "Kami ingin semua kegiatan yang ada di Kodim Kota Yogya tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu setiap kegiatan harus sesuai anggaran dan tidak ada pemotongan anggaran," tegasnya. **(Sni) -f**

Honda Tebar Kasih Sayang Keselamatan Berkendara

Astra Motor Yogyakarta

YOGYAKARTA (KR) – Usia remaja merupakan usia produktif dan penuh dengan rasa penasaran. Banyak korban kecelakaan sepeda motor berasal dari usia remaja khususnya SMA/SMK. Hal ini menjadi perhatian bagi Astra Motor Yogyakarta untuk membekali pengetahuan keselamatan berkendara. Namun hal ini tidak lepas dari tugas para guru dan perangkat sekolah untuk menciptakan budaya keselamatan berkendara di lingkungan sekolah.

SMK Muhammadiyah Sumpiuh sebagai salah satu sekolah binaan safety riding Astra Motor Yogyakarta berkomitmen untuk memberikan pengetahuan berkendara kepada para siswa. Melalui kegiatan webinar safety riding via zoom dengan peserta para guru, staff/karyawan dan juga satpam di ajak untuk menjadi duta keselamatan sekolah. Dihadiri oleh 32 peserta selama 2 jam para peserta webinar safety riding dibekali pengetahuan dan teknik berkendara yang aman dan nantinya akan ditularkan kepada para siswa.

"Kami berharap para guru dapat menjad duta keselamatan bagi siswa siswinya agar cita-cita para siswa siswi tidak akan tehambat akibat kecelakaan sepeda motor" pungkas Muhammad Ali Iqbal Supervisor Safety Riding & Community. **(*)**

PENGURUS APSI DIY DILANTIK

Komitmen Memuliakan Profesi Satpam

YOGYA (KR) - Pengurus DPD Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) DIY periode 2021-2026 dilantik dan dikukuhkan di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Kamis (25/2). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP APSI Azis Said. Sedangkan pengukuhan oleh Kapolda DIY yang diwakili Dirbinmas Polda DIY Kombes Pol Anjar Gunadi.

Ketua DPD APSI DIY Djohar Arifin mengatakan, APSI DIY berkomitmen untuk terus memuliakan kehidupan satpam. Yaitu mendudukan satpam sebagai bidang pekerjaan atau profesi yang lebih diakui, dihargai dan dibanggakan. Tanggungjawabnya yang besar dalam menjaga keamanan lingkungan kerja harus menjadi titik balik dalam memuliakan profesi satpam di Indonesia.

"Saatnya pekerjaan satpam menjadi sebuah profesi yang bisa dibanggakan. Dengan semakin diakui masyarakat, otomatis akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan satpam," terang Djohar kepada *KR* di sela acara pelantikan.

Menurut dia, untuk berprofesi sebagai satpam seseorang harus menjalani pendidikan dan pelatihan kesatpaman terlebih dahulu dan tersertifikasi. Nantinya satpam yang lulus sertifikasi akan mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) resmi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). "Jadi kemampuan para satpam akan terstandardisasi. Sedangkan KTA untuk mengantisipasi satpam gadungan," ujar Djohar.

KR-Devid Permana

Djohar Arifin

Lebih lanjut Djohar mengatakan, APSI merupakan asosiasi satpam yang telah diakui oleh Mabes Polri dan Kemenkumham. Sebagai anak kandung sekaligus mitra Polri, APSI juga turut mengembangkan regulasi bidang industrial security di Indonesia. Selain itu membantu Polri dalam menegakkan peraturan satpam di Indonesia. "Keberadaan satpam sangat strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan kerja. Karena itu, APSI hadir memiliki visi dan misi yang jelas dalam rangka memuliakan profesi satpam," pungkasnya. **(Dev)-f**